

BAB II

KRONOLOGI KONFLIK IRLANDIA UTARA

Konflik Irlandia Utara atau yang dikenal dengan konflik the troubles berlangsung selama hampir 30 tahun. Dalam bab ini, akan dijelaskan akar konflik Irlandia Utara yang menjadi pemicu rentetan kekerasan. Penulis akan menjelaskan bahwa konflik antara Protestan dan Katolik ini bersumber dari sentimen etnis yang bergeser ke arah kepentingan politik.

A. Masalah Identitas Sebagai Akar Konflik

Sebuah konflik didasari oleh banyak faktor seperti etnisitas dan ketimpangan serta agama yang menjadi salah satu pusat dimensi dalam kehidupan sosial yang heterogen. Faktor-faktor yang tumpang tindih ini pula yang mempengaruhi signifikansi politik. Dalam bukunya *Religion, Identity and Politics in Northern Ireland: Boundaries of Belonging and Belief*, Claire Mitchell menjabarkan terdapat beberapa sumber yang turut mempengaruhi signifikansi politik dalam konflik Irlandia Utara yaitu: pertama, agama secara integral terikat dengan kekuatan hubungan antara gereja dan politisi yang kemudian bekerjasama untuk merepresentasikan kelompok Unionis dan Nasionalis di Irlandia utara. Kedua, agama adalah pembatas dan basis meluasnya segregasi, seperti halnya agama menunjukkan bermacam-macam sumber (kitab ajaran) untuk memisahkan antara grup satu dengan lainnya termasuk ritual keagamaan yang membangun solidaritas dalam komunitas secara praktik maupun kognitif baik bagi Protestan maupun Katolik. Ketiga, ideologi agama memang bersumber dari agama namun tidak secara teologi dan juga tidak menginformasikan identifikasi kelompok komunitas khususnya Protestan, sehingga teologi dan doktrin membantu menyusun definisi kelompok identitas dan politik untuk para Protestan. (Mitchell, 2006)

Sumber-sumber tersebut bertumpang tindih dan memperkuat dimensi sosial lain seperti etnisitas dan ketimpangan. Ini alasan mengapa agama menjadi akar konflik yang sangat dalam di budaya dan struktur politik Irlandia utara. Konflik Irlandia utara bukan hanya sekedar konflik agama. Konflik ini secara esensial merupakan konflik etno-nasional, dan faktor lainnya seperti agama akan memperkuat sentiment etnisitas tersebut.

“it maps the top-down connections between the churches and political power, as well as exploring how religion is used by Protestan and catholics from the bottom up in processes of social identification and community construction. Sometimes religion does simply act as an identity marker.”
(Mitchell, 2006)

Mitchell mengaitkan hubungan antara gereja dan kekuasaan politik dimana politisi seringkali menggunakan terminasi agama untuk melegalkan dominasi kekuasaannya dengan membentuk batasan identitas masyarakat. Masalah etnisitas yang kemudian dikuatkan oleh isu agama merupakan pemicu irredentisme di Irlandia.

B. Pemisahan Irlandia Utara Dan Republik Irlandia

Konflik Irlandia Utara atau yang disebut dengan *The Troubles* berawal dari perbedaan cara pandang etnisitas yang kemudian bergeser kearah sentiment agama dan menimbulkan segregasi politik dan sosial antara masyarakat Katolik dan Protestan di Irlandia. Masalah etnisitas antara Nasionalis dan Unionis muncul sejak abad 16 dimana terjadi perbedaan pandangan nenek moyang. Nasionalis yang merupakan pemeluk Katolik berpandangan bahwa nenek moyang mereka merupakan bangsa Celtic, sedangkan para Unionis yang sebagian besar merupakan pemeluk Protestan mengklaim bahwa leluhur mereka adalah bangsa Cruthin (Dixon, 2008). Perdebatan ini kemudian bergeser kearah siapa penghuni pertama tanah Irlandia. Kemudian masalah territorial ini berlanjut menjadi perdebatan dan gesekan politik antara Unionis dan Nasionalis.

Hal itu bermula setelah kemenangan William of Orange atau William III merebut kedaulatan James II sebagai Raja Katolik. Dalam kekuasaannya, William memastikan keunggulan Protestan di tanah Inggris termasuk Skotlandia dan Irlandia kala itu. Sejak saat itu pula Parlemen Protestan di Irlandia mengontrol penuh di beberapa sektor publik termasuk kepemilikan tanah, sekolah, dan hukum (Kendle, 1989). Akibat dari monopoli politik yang dilakukan komunitas Protestan tersebut, kedua komunitas baik komunitas Katolik dan Protestan melakukan aksi kekerasan dengan dalih membela diri dari ancaman satu sama lain. Aksi kekerasan yang terus berlangsung hingga awal abad kedua puluh tersebut memaksa pihak Inggris untuk menyusun Home Rule Bill yang akan membatasi *self-government*.

B.1. Kegagalan Home Rule Bill

Home Rule Bill I diusulkan pertama kali oleh Perdana Menteri Inggris Gladstone di Parlemen pada tahun 1886. Walaupun langkah tersebut ditolak oleh *House of Commons*, namun *Home Rule Bill* I cukup mampu membuat ancaman bagi dominasi politik Protestan Irlandia yang sebagian besar berada di Irlandia bagian utara. Orangeism – sebutan untuk para pendukung William of Orange- pun bangkit dengan dukungan dari Konservatif yang membentuk Unionis yang tetap mendukung bersatunya Kerajaan Inggris dan Irlandia (BBC, n.d.)

Home Rule Bill II pun diusulkan kembali oleh Gladstone pada tahun 1893. Namun seperti *Home Rule Bill* I, *Home Rule Bill* kedua juga ditolak ketika masa peralihan kekuasaan Liberal dari kekuasaan Konservatif dimana saat itu Konservatif sedang memperpanjang masa jabatannya di parlemen, hingga pada akhirnya Liberal berhasil menguasai parlemen pada tahun 1905 dan berusaha mewujudkan *self-government* untuk Irlandia (Parliament.UK, n.d.).

Pada tahun 1912, *Home Rule Bill* III dan *Home Rule Bill* IV berhasil diloloskan oleh *House of Commons*, namun keduanya juga ditolak oleh *House of Lords* dimana memiliki kedudukan yang lebih tinggi di parlemen Inggris. Dibawah kepemimpinan tokoh advokat yang juga duduk di parlemen yang cukup berpengaruh yaitu Edward Carson, Baron Carson of Duncairn, menolak penggabungan Irlandia dan membentuk negara sendiri. (Parliament.UK, n.d.)

Perang sipil di Irlandia antara Nasionalis di selatan dan Unionist di utara semakin terlihat. Pada tahun 1914 *Home Rule Bill* V atau *Home Rule Act* yang dibuat tahun 1912 diloloskan oleh *House of Commons* untuk yang ketiga kalinya dan diratifikasi oleh *House of Lords*. Namun ketika itu perang pecah di sebagian besar wilayah Eropa sehingga pemerintah Inggris menanggihkan *Home Rule Act* sampai perang berakhir. (Irish Time, n.d.)

Meskipun terjadi perbedaan pandangan secara politik namun ribuan Katolik Irlandia dan Protestan Irlandia bergabung dengan Inggris dalam Perang Dunia I. Pada tahun 1916 ketika diselenggarakan perayaan paskah (*easter rising*) situasi di Irlandia mulai berkejolak secara dramatis. Para Nasionalis merampas *General Post Office* di Dublin dan memproklamkan kemerdekaan Irlandia sebagai negara republik. Pemberontakan ini terjadi sebagai respon terhadap aksi Inggris yang mengeksekusi para pemimpin kelompok mereka termasuk tujuh orang yang menandatangani deklarasi Irlandia sebagai Republik. Irlandia bagian selatan menjadi semakin radikal karena menganggap *Home Rule Bill* terakhir hanya berpihak kepada Protestan Ulster (BBC, n.d.)

Pada tahun 1918 dibentuklah Sinn Fein sebagai partai dari republik yang dipimpin oleh Eamon Valera. Pada awal pembentukan Sinn Fein ini bertujuan untuk menolak *Home Rule* dan mengambil alih partai mereka di Parlemen Westminster dengan mendirikan parlemen alternative

bernama Dail Eireann di Dublin yang didukung oleh Irish Republican Army (IRA) (Irish Time, n.d.).

B.2. Government of Ireland Act 1920

Tahun 1919 pemerintah Inggris dibawah David Llyod George diharuskan untuk mengambil keputusan ditengah keadaan yang sangat sulit dimana sebagian masyarakat Irlandia menolak bersatunya Irlandia dengan Inggris dan sebagian lain di Ulster menolak pemisahan Irlandia. Akhirnya tahun 1920, munculah perjanjian *Government of Ireland Act* yang pembagian Irlandia menjadi dua serta pembentukan masing-masing parlemen dan dewan Irlandia.

“1- (1) On and after the appointed day there shall be established for southern Ireland a parliament of southern Ireland consisting of His Majesty of the Senate of Southern Ireland, and the House of Commons of Southern Ireland, and there shall be established for Northern Ireland a parliament to be called the Parliament of Northern Ireland consisting His Majesty, the Senate of Northern Ireland, and the House of Commons of Northern Ireland.

(2) For the purposes of this act, Northern Ireland shall consist of the parliamentary counties of Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry, Tyrone, and the parliamentary borough of Ireland as is not comprised within the said parliamentary counties and borough.

2. – (1) with a view to the eventual establishment of a Parliament for the whole of Ireland, and to bringing about harmonious action between the parliaments and government of Southern Ireland and Northern Ireland, and to the promotion of mutual intercourses and uniformity in relation to matters affecting the whole of Ireland, and to providing for the administration of services which the two parliaments mutually agree should be administrated uniformly throughout the whole of Ireland, or which by virtue of this Act are to be so administrated, there shall be constituted, as soon as may be after the appointed day, a council to be called the council of Ireland.

(2) Subject as hereinafter provided, the Council of Ireland shall consist of a person nominated by the Lord Lieutenant acting in accordance with instruction from His Majesty who shall be President and forty other persons, of whom seven shall be members of the House of Commons of Southern Ireland, seven shall be members of the senate of Northern Ireland, and thirteen shall be members of the House of Commons of Northern Ireland. (Government of Ireland Act 1920 – Chapter 67)

Salah satu Irlandia terdiri dari enam dari sembilan wilayah di Ulster yang kemudian disebut Irlandia Utara. Irlandia bagian lain terdiri dari tiga wilayah yang lainnya di ulster ditambah 23 wilayah lain di selatan Irlandia yang kemudian berdiri menjadi *Irish Free State*. Namun, sebagian masyarakat di enam wilayah di Ulster yang tergabung di Irlandia Utara masih menginginkan bersatunya Irlandia yang bertentangan dengan isi *Government of Ireland Act*. Pemerintah Llyod



George pun kemudian bernegosiasi dengan Sinn Fein untuk membuat perjanjian *Anglo-Irish Treaty* pada tanggal 6 Desember 1921. Perjanjian ini memberikan Irlandia sebagai negara berdaulat dan lepas dari Kerajaan Britania Raya dengan mengikutsertakan enam wilayah yang berada di Ulster bagian Irlandia Utara untuk menentukan nasib kewarganegaraannya. (David McKittrick, 2002)

Gambar 1. Peta Republik Irlandia dan Irlandia Utara

Sumber: (Warwick.UK, n.d.)

Komisi perbatasan dibentuk kemudian untuk meninjau perbatasan antara Irlandia yang telah berdiri sendiri dan Irlandia Utara. Komisi perbatasan mengajukan wilayah-wilayah dengan territorial kecil yaitu Fermanagh, Tyrone, dan Armagh untuk bergabung dengan Irlandia sebagai *Irish Free State* dan Donegal menjadi wilayah Irlandia Utara. Namun perubahan pembagian wilayah ini kembali menuai penolakan dari kedua belah pihak baik *Irish Free State* maupun Irlandia Utara. Akhirnya pada 3 Desember 1925 Komisi perbatasan memutuskan bahwa enam wilayah yaitu Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry (Derry), dan Tyrone menjadi wilayah Irlandia Utara dan wilayah sisanya bergabung dengan Irlandia yang sudah berdiri sendiri dan resmi menjadi Republik Irlandia pada tahun 1949 (*Government of Ireland Act 1920, chp.67*)

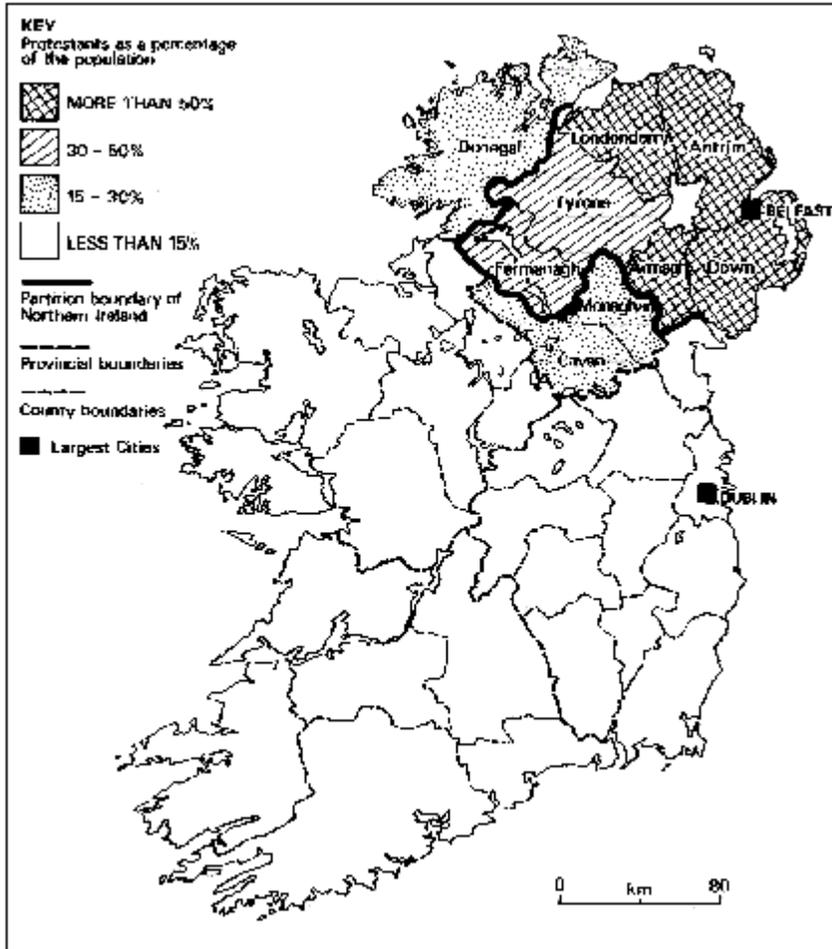
C. Diskriminasi

Seperti yang telah dijelaskan oleh Mitchell bahwa salah satu faktor terjadinya konflik adalah ketimpangan. Ketimpangan ini terjadi akibat diskriminasi terhadap golongan tertentu di beberapa bidang. Dalam konflik Irlandia Utara ini diskriminasi yang paling mempengaruhi konflik adalah diskriminasi dalam bidang politik, militer dan partisipasi ekonomi.

C.1. Diskriminasi Politik

Setelah Irlandia dibagi menjadi dua sesuai dengan *Government Of Ireland Act 1920*, dominasi politik di Irlandia Utara kini dikontrol oleh Protestan. Kontrol yang dibuat oleh para Protestan membuat garis pembatas untuk Irlandia. Irlandia Utara yang terdiri atas enam wilayah dari sembilan wilayah di Provinsi Ulster. Tiga wilayah lain tidak termasuk bagian dari Irlandia

Utara karena sebagian besar penduduk di tiga wilayah tersebut merupakan penduduk Katolik (CAIN, n.d.).



Gambar 2. Demografi Religi Irlandia Utara

Sumber: (CAIN, n.d.)

Dalam gambar tersebut menunjukkan wilayah di Ulster yang hanya memiliki 30% penduduk Protestan pada saat itu. Saat pembagian wilayah, pemerintah Inggris menyerahkan otoritas untuk kedua Irlandia dalam sistem pemerintahannya. Untuk Irlandia utara diperkenankan untuk memilih parlemen sendiri, mengimplemetasikan hukum lokal dan general, dan mengatur urusan internasionalnya sendiri. Pengecualian yang tidak diperkenankan untuk diambil alih secara

mandiri oleh Stormont sebagai parlemen adalah, mencetak uang dan membentuk tentara (CAIN, n.d.).

Saat Irlandia utara masih mengadopsi sistem *proportional representative* dari Inggris yang digunakan untuk pemilihan umum, Katolik mendapatkan 40% untuk dewan pada tahun 1920 Katolik memenangkan 20 dari 80 dewan. Namun sejak parlemen didominasi oleh Protestan dan terjadi perubahan pada proporsional sistem, tren parlemen berbalik, Katolik hanya mendapat dua dari 80 total dewan pada tahun 1924 (CAIN, n.d.)

Perubahan proporsional sistem sangat efektif bagi legislatif Irlandia utara untuk membatasi hak pilih masyarakat Katolik. terdapat dua kategori untuk masyarakat yang memiliki hak pilih. Kategori-kategori ini akan menetapkan dominasi Protestan di politik Irlandia utara. Kategori pertama adalah '*ratepayers*' atau orang yang memiliki kewajiban membayar pajak, yakni penghuni rumah baik pemilik maupun penyewa. Pemilih dalam kategori ini hanya memperkenankan dua orang pemilih untuk memberikan suara termasuk penyewa dan anak-anak yang beranjak dewasa. Baik penyewa ataupun anak-anak yang beranjak dewasa sebenarnya dikhususkan untuk keluarga Katolik yang sebagian besar berada pada tingkat ekonomi yang rendah dan jumlah anggota keluarganya banyak. Kategori kedua adalah orang yang memiliki properti yang dikomersilkan dengan nilai *property* minimal £10 per tahun. Pemilih pada kategori ini diperbolehkan untuk menominasikan pemilih khusus sebanyak maksimal enam pemilih untuk setiap £10 pada propertinya. Pada kenyataannya sebagian pemilik *property* merupakan masyarakat Protestan sehingga Protestan akan tetap mendominasi kotak suara. (O'Brien, 2010)

C.2. Diskriminasi Militer

Diskriminasi politik yang merugikan Katolik sangat terang-terangan terdapat pada *Special Powers Act* tahun 1922 yang diimplementasikan untuk menarik ulur separatis yang tidak menyetujui sistem tersebut. Undang-undang ini memperbolehkan penawanan tanpa percobaan atau dampungan pengacara sekaligus tanpa batasan waktu yang tidak pasti serta penggeledahan dan perampasan tanpa perlu surat perintah. *Special Powers Act* berada dibawah wewenang pemerintah yang dilaksanakan oleh polisi Irlandia Utara yang disebut sebagai *Royal Ulster Constabulary* (RUC) dan anggota paramiliter yang disebut *Ulster Special Constabulary* (Donohue, 1998).

RUC dikontrol penuh oleh jendral inspektur dan menteri urusan dalam negeri Irlandia utara. Meskipun 3000 pria tercatat masuk dalam pasuka RUC namun presentase masyarakat Katolik yang masuk dalam pasukan ini tidak pernah lebih dari 12%. Minimnya jumlah militer Katolik di RUC ini meimbulkan persepsi dari komunitas Katolik bahwa pria-pria Katolik yang tergabung dalam RUC hanya menyerah dalam tekanan politik Protestan. Pemerintah Irlandia utara membentuk *Ulster Special Constabulary* pada tahun 1920 untuk melawan IRA dan para separatis yang melawan yuridiksi sesuai ketetapan *Special Power Act* dan melawan Partisi atau pemisahan Irlandia (Hancock, 1996).

C.3. Diskriminasi Dalam Partisipasi Ekonomi

Selain kontrol atas politik, Unionis juga mendominasi kontrol ekonomi dan membuat ketimpangan antara Protestan dan Katolik. Unionis menentukan *share of public sector*. Di Irlandia utara pembangunan rumah bersubsidi diatur oleh kontrol parlemen Unionis dan dewan lokal. Rumah bersubsidi dikontrol langsung oleh lembaga bernama *Local Housing Authorities (LHAs)* yang ditunjuk langsung oleh dewan yang terpilih di pemilu. Manipulasi politik yang mendiskriminasi Katolik membuat Unionis mampu melakukan kontrol penuh termasuk untuk memilih anggota LHAs (Hancock, 1996).

Secara umum dewan Unionis menggunakan kontrolnya untuk menolak perumahan untuk Katolik dan lebih mempertimbangkan Protestan jika di dalam satu distrik terdapat permintaan yang bersamaan. Sebenarnya taktik ini tidak lain untuk melanggengkan dominasi Protestan di politik dengan “mengatur” *electoral majority*. Unionis juga memberlakukan sistem *three-bedroom*, artinya setiap unit hanya terdapat tiga buah ranjang tidur. Aturan ini tidak mempertimbangkan jumlah keluarga Katolik yang sebagian besar adalah keluarga besar yang jumlah anggota setiap keluarga banyak. LHAs juga memberikan subsidi kepada sarjana dan pasangan yang tidak memiliki anak. Aturan-aturan ini semakin mempersulit kebutuhan dasar masyarakat Katolik. Praktik diskriminasi dalam bidang properti ini akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat Katolik sehingga kepemilikan property lebih banyak dikuasai oleh Protestan. (O'Brien, 2010)

Pada sektor ketenagakerjaan, sebanyak 40% Katolik berada pada sektor buruh manual. Hanya 11% diantara mereka menempati posisi senior pada tahun 1951, lalu menyusut pada tahun 1959 sebanyak 6%. Pada sektor privat terdapat dua kategori utama yang tidak seimbang antara Protestan dan Katolik, yakni kategori: level pengangguran dan tipe pekerja. Masyarakat Katolik

lebih banyak bekerja menjadi buruh, yang paling rendah adalah buruh pasar dan selebihnya adalah buruh pabrik manufaktur dan tekstil bergaji rendah. Disisi lain masyarakat Protestan mendominasi tipe pekerjaan dengan gaji besar yakni pembuatan kapal dan teknisi (Hancock, 1996).

Diskriminasi juga dilakukan di sektor perekrutan tenaga kerja oleh kebijakan dari pemangku jabatan. Contohnya kebijakan dari Perdana Menteri Irlandia utara yang menjabat selama 20 tahun, Sir Basil Brooke yang aktif memperomosisan sistem ketenaga kerjaan dimana lowongan kerja hanya ditawarkan melalui organisasi sosial seperti Orange Order yang merupakan sebuah organisasi persaudaraan Protestan. Kebijakan dari Sir Basil Brooke ini disampaikan di Londonderry:

“I recommend those people who are Loyalists not to employ Roman Catholics, 99 per cent of whom are disloyal; I want you to remember one point in regard to the employment of people who are disloyal....You are disenfranchising yourselves in that way....You people who are employers have the ball at your feet. If you don't act properly now before we know where we are we shall find ourselves in the minority instead of the majority.” (Bob Rowthorn, 1988)

Sir Brooke menekankan bahwa mereka yang Loyalis (Protestan) mendapatkan kesempatan bekerja lebih besar dibandingkan mereka yang bukan Loyalis (Katolik). Masyarakat Katolik juga ditolak di semua instansi dimana hanya merekrut Protestan. Akibatnya banyak masyarakat Katolik berhenti untuk melamar pekerjaan di perkantoran.

D. Rentetan Aksi Kekerasan

Tekanan yang dihadapi masyarakat Katolik Irlandia setelah pemisahan Irlandia, membuat masyarakat Katolik Irlandia perlahan melakukan pemberontakan. Dipertengahan tahun 1960-an terdapat beberapa pergerakan dari masyarakat Katolik. beberapa organisasi seperti NICRA (Northern Ireland Civil Rights Association) dan SDLP (Social Democratic and Labour Party)

mengadvokasi untuk mengembalikan hak pilih masyarakat Katolik dan menuntut persamaan hak untuk masyarakat Katolik di semua sektor. Pada masa jabatannya antara tahun 1963-1969 Perdana Menteri Irlandia Utara Terence O'Neill telah mengkampanyekan reformasi secara simbolis agar Katolik dipertimbangkan untuk masuk ke partai Unionis. O'Neill megupayakan akomodasi hak kepada komunitas Katolik untuk melakukan perubahan seperlunya di beberapa sektor khususnya ekonomi. Namun perubahan ini dirasa kurang oleh masyarakat Katolik. (CAIN, n.d.)

Akibatnya, kekerasanpun muncul sebagai respon ketidakadilan yang didapatkan masyarakat Katolik. kekerasan dimulai tahun 1968 dimana NICRA melakukan aksi damai menuntut persamaan hak sipil bagi masyarakat Katolik. Aksi pertama mereka dilakukan dengan *long-march* dari Coalisland ke Dungannon yang masih berjalan damai pada bulan maret 1968. Namun, aksi damai kedua yang berlangsung di Derry pecah dan berakhir dengan kekerasan oleh RUC. Tiga bulan kemudian sekelompok mahasiswa radikal dan *People's Democracy* melakukan aksi damai kembali dari Derry ke Belfast, namun kembali berakhir kerusuhan ketika polisi dan Unionis menyerang demonstran di Derry. (David McKittrick, 2002)

Saat musim panas tahun 1969 kekerasan antara demonstran Unionis yang dibantu polisi dan Katolik yang kemudian dibantu IRA meningkat. Hal ini membuat pemerintah Inggris melakukan intervensi dalam bentuk militer. Insiden utama adalah ketika *Protestant Apprentice Boys* melakukan parade tahunan di Derry dengan melakukan *long-march* di sepanjang kota. Dalam parade tersebut terjadi aksi lempar batu dari komunitas Katolik, disertai bom petrol, dan barikade yang menghadang demonstran. Setelah dua hari terjadi bentrokan antara polisi dan komunitas Katolik, akhirnya militer Inggris dikerahkan untuk memisahkan para kombatan. Sejak tahun 1969 hingga tahun 1971, pemerintah Inggris mencoba mereformasi beberapa sektor seperti yang diminta oleh NICRA dan SDLP. Permintaan yang diajukan oleh NICRA dan SDLP ialah kesetaraan dalam

memiliki hak pilih, menyesuaikan *electoral-districts*, membubarkan pasukan khusus RUC yang memulai kerusuhan di Derry, dan pembentukan eksekutif perumahan yang baru untuk mengatur distribusi perumahan rakyat secara objektif dengan menggunakan *needs-based system* atau sistem yang mempertimbangkan kebutuhan bukan agama (Hancock, 1996).

Meskipun beberapa permintaan dikabulkan oleh Inggris, namun reformasi ini hanya berjalan tidak maksimal karena diimplementasikan hanya di beberapa sektor. Misalnya tuntutan untuk dibubarkannya pasukan khusus RUC yang melakukan kekerasan di Derry, meskipun pada akhirnya pasukan tersebut dibubarkan namun para anggota diperbolehkan untuk masuk dalam Ulster Defence Regiment (UDR) yang dibentuk untuk membantu militer Inggris. Reformasi yang setengah hati tersebut membuat komunitas Katolik terpolarisasi dan semakin membuat hubungan antara komunitas Katolik dan paramiliter semakin tegang.

Rentetan aksi kekerasan antara Protestan dan Katolik yang melibatkan sipil dan militer sampai pada eskalasi konflik pada tahun 1971 ketika *special power act* diberlakukan dengan menawan 342 orang dalam serangan pertama. Hal ini diperparah dengan militer Inggris yang diinstruksikan untuk menawan demonstran Katolik, sehingga para demonstran Katolik melakukan kembali aksi yang menyuarakan anti penawanan yang berakhir dengan kerusuhan besar-besaran di Derry yang dikenal dengan sebutan *Bloody Sunday Killing* pada Januari tahun 1972. Tentara Inggris ditembak oleh demonstran Katolik dan membunuh tiga belas orang. (NEWS BBC, n.d.)

Pemerintahan Inggris semakin melakukan intervensi terhadap Stormont yang langsung diperintah oleh Westminster. Tawanan pun langsung di eksekusi dengan mengimplementasikan '*Diplock Courts*', Pengadilan yang dibentuk khusus oleh Westminster untuk mengadili pemberontak Republikan yang dipimpin langsung oleh Kenneth Diplock seorang hakim dari Inggris. IRA melakukan perombakan dalam struktur organisasinya dan memperkuat pertahanan

untuk melindungi masyarakat Katolik dan memamerkannya pada polisi dan paramiliter Protestan (Hancock, 1996).

Pada saat itu, antara Unionis dan Nasionalis, Irish dan British, Protestan dan Katolik terjadi hubungan dengan tensi yang tinggi termasuk di Republik Irlandia. Pada tanggal 2 Februari, Kedutaan Besar Inggris di Dublin. Dua puluh hari berikutnya IRA mengebom barak tentara Inggris - *Parachute Regiment* - di Aldershot dan membunuh tujuh masyarakat sipil. Pada tanggal 1 Desember 1972 dua orang tewas di Dublin dan 80 orang luka-luka akibat bom dari Loyalis. Setelah kejadian ini, Faulkner sebagai Perdana Menteri Irlandia Utara saat itu dipanggil oleh Perdana Menteri Inggris ke London dan menyatakan bahwa London mengambil alih keamanan di Irlandia Utara dan Faulkner kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri (Northern Ireland Search For Peace History, 1999)

Sepanjang tahun 1972 tercatat korban tewas dalam konflik the troubles ini sebanyak 103 tentara, 41 polisi dan UDR serta 323 masyarakat sipil dan menjadi korban tewas terbanyak dalam sejarah konflik ini. Pada titik puncak konflik, Irlandia Utara pun melakukan referendum pada tahun 1973 untuk mencoba meredam konflik dengan hasil 90:1 yang berarti Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Britania Raya. Namun masyarakat Katolik memboikot hasil referendum tersebut. Sehingga tanggal 28 Juni dilakukan *voting* dibawah *proposional representative* untuk memilih 78 anggota majelis dan menyusun perjanjian damai. (NEWS BBC, n.d.)